

STRATEGI PEMENANGAN PARTAI GOLKAR DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2024

Yusa Djuyandi*, Ahmad Habibie Bungsu Maula Akbar

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan politik yang digunakan oleh partai Golkar pada Pemilu 2024. Diawali dengan partai Golkar sebagai partai yang melakukan transformasi pasca reformasi dimana partai Golkar selalu menempati urutan lima besar partai pemenang Pemilu. Sehingga, di Pemilu 2024 partai Golkar berkomitmen akan dapat memenangkan Pemilu baik pada pemilihan Presiden dan legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan pendekatan teori strategi ofensif dan defensif. Hasil penelitian ini menemukan strategi defensif yang dilakukan oleh partai Golkar adalah melakukan konsolidasi internal partai. Sedangkan strategi ofensif partai Golkar adalah melakukan konsolidasi terhadap simpatisan, sayap partai, pegiat desa dan media sosial.

Katakunci: Strategi, Partai Golkar, Pemilu 2024

Abstract

This study aims to determine the political winning strategy used by the Golkar party in the 2024 election. Starting with the Golkar party as a party that has undergone a post-reform transformation where the Golkar party always ranks in the top five election winning parties. So, in the 2024 election the Golkar party is committed to being able to win the election both in the Presidential and legislative elections. This study uses a phenomenological approach with offensive and defensive strategy theory approaches. The result of this study found that the defensive strategy carried out by the Golkar party was to carry out internal party consolidation. Meanwhile, the offensive strategy of the Golkar party is to consolidate sympathizers, party wings, village activists and social media.

Keyword: Strategy, Golkar Party, 2024 Election

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai sebuah bentuk konsekuensi dari sebuah negara demokrasi adalah mengharuskan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala dalam periode waktu tertentu. Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat. Sehingga, sebagai bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat, bahwa dalam sebuah sistem demokrasi yang dijadikan sebagai sistem politik di Indonesia harus

dapat menjamin bahwa rakyat dapat terlibat penuh dalam mengatur, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta dapat menilai proses pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, oleh karenanya sebagai salah satu bentuk pengimplementasian nilai dan prinsip demokrasi adalah dengan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi keterwakilan yang dimana sistem demokrasi keterwakilan merupakan cenderung membutuhkan instrument untuk dapat menghubungkan rakyat dengan pemerintah (negara). Untuk dapat menciptakan hal demikian tentu diperlukan satu mekanisme tertentu untuk dapat menciptakan relasi antara rakyat dan pemerintah dimana mekanisme tersebut dilakukan melalui proses Pemilu. Secara umum Pemilu merupakan suatu bentuk proses untuk dapat memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan atau jabatan politik tertentu, termasuk dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai sebuah negara demokrasi, tentu proses berjalannya pemerintahan harus berjalan secara demokratis, dimana pembangunan politik menjadi diskursus utama dalam menciptakan kondisi yang demokratis. Dalam negara demokrasi, kedudukan partai politik memiliki peranan yang sangat dominan dan penting dalam melakukan pembangunan politik dalam sebuah negara tersebut. Dimana partai politik sebagai institusi politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya sebagai alat atau instrumen untuk melakukan pembangunan politik seperti melakukan rekrutment politik, komunikasi politik dan sosialisasi politik.

Partai politik secara universal merupakan alat perjuangan bagi sekelompok orang yang memiliki persamaan orientasi terhadap nilai, cita-cita dan ideologi serta pandangan hidup. Partai politik memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, dimana partai politik adalah bagian dari kekuasaan, hal ini dikarenakan bahwa secara fundamental tujuan dari partai politik adalah melakukan perebutan dan mempertahankan kekuasaan yang

nantinya akan memberikan keuntungan bagi setiap anggota partai baik secara idiil maupun secara materil. Selain memiliki tujuan untuk dapat menduduki kekuasaan politik, partai politik memiliki peranan dan fungsi untuk melakukan pembangunan politik. Salah satu bentuk peranan partai politik dalam melakukan pembangunan politik adalah dengan melakukan peingkatan terhadap partisipasi politik kepada warga negara.

Definisi partai politik menurut Giovanni Sartoni (Budiardjo, 2008:404) merupakan suatu bentuk kelompok politik yang mengikuti proses penyelenggaraan pemilihan umum dan melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum tersebut partai politik mampu untuk dapat menempatkan calonnya untuk dapat menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan, definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich (Budiardjo, 2008) merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan memiliki tujuan untuk dapat merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, dapat memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Indonesia merupakan negara demokrasi, bahwa salah satu bentuk ciri negara demokrasi adalah memiliki partai politik. Indonesia memiliki banyak partai politik dengan pandangan dan ideologi partai politik yang berbeda, salah satunya adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam konteks Indonesia, Golkar memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia, dimana Golkar terbentuk atas dasar keinginan untuk dapat membendung pengaruh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Pada masa orde baru, Golkar yang merupakan sebagai partai pemerintah

menduduki peranan yang sangat penting bagi kekuasaan politik pada masa itu. Golkar menjadi sebuah bentuk kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan non-sektarian.

Paska runtuhnya rezim orde baru yang merupakan bentuk manifestasi kekuasaan dari Golkar membuat kedudukan Golkar mengalami perubahan yang signifikan. Paska runtuhnya rezim orde baru, banyak kalangan yang beranggapan bahwa Golkar akan runtuh bersama rezim dikarenakan kepercayaan rakyat terhadap Golkar akan menurun. Pada Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 1998, Golkar merubah dirinya yang melakukan transformasi menjadi sebuah partai politik dengan bentuk paradigma baru, yang dimana partai Golkar memiliki tujuan untuk dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa partai Golkar yang sekarang memiliki sifat dan semangat reformis yang berbeda dengan Golkar sebelumnya. Adapun tokoh partai Golkar yang melakukan transformasi partai adalah Akbar Tanjung, yang membuat Golkar pada saat itu menjadi partai yang modern, demokratis dan reformis hingga saat ini.

Partai Golkar sekarang memandang demokrasi sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, dimana partai Golkar saat ini memiliki visi untuk bersifat terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar dan responsif. Sebagai partai yang telah melakukan transformasi menjadi partai yang demokratis, reformis dan terbuka membuat partai Golkar memiliki peranan penting di era reformasi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, dimana Golkar sebagai partai politik memiliki tugas sebagai penghubung antara masyarakat dan penguasa. Dengan adanya partai politik membuat

warga negara dapat secara langsung terlibat dalam proses penyelenggaraan politik negara dengan dapat menempatkan wakilnya dalam jabatan-jabatan politik melalui partai politik. Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 Pasa; 1 Ayat (1) bahwa partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

Untuk dapat menciptakan kondisi yang demokratis sesuai dengan cita-cita partai Golkar, oleh karenanya partai Golkar memiliki peranan untuk dapat melakukan pembangunan politik melalui adanya peningkatan partisipasi politik terhadap setiap warga negara secara langsung. Oleh karenanya, disini penulis akan melakukan analisis mengenai peranan partai politik dalam melakukan pembangunan ekonomi khususnya partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di era reformasi sebagai era demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kedudukan partai Golkar saat ini tentu berbeda dengan kondisi partai Golkar pada masa orde baru, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana peran partai Golkar dalam melakukan pembangunan politik melalui peningkatan partisipasi politik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh partai Golkar yaitu terciptanya kondisi yang demokratis dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah institusi politik dalam negara demokrasi, Golkar sebagai partai politik secara prinsipil memiliki tujuan terhadap kekuasaan, baik merebut atau mempertahankan kekuasaan. Sehingga, atas dasar kekuasaan yang

diperoleh tersebut dapat menjalankan program-program dan gagasan partai dalam sebuah sistem pemerintahan yang terimplementasikan melalui kekuasaan politik yang diperoleh melalui Pemilu. Dalam sejarahnya, tentu partai Golkar bukanlah sekedar partai politik biasa di Indonesia dimana partai Golkar memiliki perjalanan sejarah panjang dan memiliki jaringan akar rumput yang telah terbangun dengan baik dalam sebuah sistem sehingga dapat menempatkan Golkar sebagai partai politik yang mapan dan besar hingga saat ini.

Namun, kekuasaan Golkar justru meredup pasca reformasi dimana pada masa orde baru pelaksanaan Pemilu selalu dimenangkan oleh partai Golkar yang menempatkan dirinya menjadi partai penguasa selama tiga dekade lebih namun redup pasca reformasi. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu secara langsung di Indonesia pasca reformasi, Golkar hanya sekali menjadi partai politik pemenang Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2004. Dari 24 partai peserta Pemilu tahun 2004, partai Golkar berhasil menjadi partai pemenang Pemilu dengan perolehan suara 24.480.757 (21,57%) dengan perolehan kursi di DPR RI sebanyak 127. Walaupun pada Pemilu 2004 partai Golkar belum berhasil menempatkan kader partai menjadi Presiden, namun perolehan suara dan kursi di DPR RI memiliki perolehan terbanyak.

Kemenangan partai Golkar pada Pemilu 2004 justru tidak memberikan efek dominan terhadap partai Golkar itu sendiri dalam Pemilu selanjutnya, walaupun partai Golkar selalu menempati urutan lima besar partai pemenang Pemilu namun partai Golkar belum mampu memberikan efek elektoral baik dalam Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya partai Golkar selalu

mengalami konflik kepentingan dualisme dalam internal partai itu sendiri, sehingga partai Golkar sulit untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang politik dikenal banyak masyarakat seperti halnya pada masa orde baru. Kurangnya sosok figur yang dicitrakan dalam partai Golkar sebagai sebuah patron dalam menjaring banyak dukungan masyarakat menjadi salah satu variabel sulitnya partai Golkar dalam meraih kursi kepemimpinan Presiden. Berbeda dengan partai PDI Perjuangan yang selalu berhasil menciptakan kader-kader partai yang mampu memberikan efek elektoral dalam setiap pelaksanaan Pemilu. PDI Perjuangan walaupun lebih terkesan sangat bersifat patronase karena kepemimpinan partai selalu dipimpin oleh trah daripada keturunan Soekarno dimana sejak reformasi hingga saat ini partai selalu dipimpin oleh Megawati Soekarno Puteri, namun model kepemimpinan seperti itu justru mampu menciptakan kondisi partai yang solid.

Berbeda halnya dengan Golkar yang selalu dirundung masalah konflik kepentingan dualisme partai yang berusaha untuk merebut kepemimpinan partai, memang terkesan demokratis namun sepertinya untuk iklim demokrasi di Indonesia saat ini kepemimpinan partai perlu dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk mengelola dan mengaktualisasikan partainya dengan cara yang otoriter dalam menciptakan soliditas partai. Sehingga, partai Golkar akan dapat memiliki fokus dalam memenangkan Pemilu baik legislatif maupun eksekutif.

Indonesia tentunya akhir-akhir ini akan menghadapi pesta demokrasi dengan dilaksanakannya pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Partai Golkar tentunya tidak hanya ingin menjadi partai politik yang terkesan mencari aman dari proses Pemilu yang hanya

menjadi partai pengusung lalu atas dasar koalisi memperoleh keuntungan politik dalam mengisi pos jabatan menteri kabinet seperti halnya pada Pemilu 2019. Partai Golkar dalam Pemilu 2024 akan mengusung Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum partai Golkar menjadi calon Presiden Indonesia tahun 2024. Keputusan mengusung Airlangga Hartanto secara politik merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek elektoral pada Pemilu mendatang. Ini adalah sebuah langkah strategi pemenangan partai Golkar menjadi partai pemenang Pemilu baik legislatif dan eksekutif. Seperti halnya partai Gerindra yang mengambil peran utama dalam panggung politik dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2009, Presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 sehingga mampu memberikan efek elektoral yang menempatkan Gerindra saat ini sebagai partai pemenang Pemilu kedua setelah PDI Perjuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai fenomena strategi partai Golkar dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, penulis bermaksud akan melakukan kajian analisa mengenai strategi partai Golkar dalam memenangkan Pemilu tahun 2024 yang memfokuskan terhadap strategi partai Golkar itu sendiri sebagai sebuah partai politik.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh melalui observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu maupun pemberitaan media yang relevan. Data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan menggunakan Teknik triangulasi data, sehingga hanya data

yang memiliki kesesuaian yang digunakan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilu 2024 akan segera dilaksanakan dan telah menjadi sebuah keharusan setiap partai politik untuk mempersiapkan segala bentuk yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi Pemilu guna dapat memenangkan Pemilu sebagaimana yang diharapkan. Strategi politik yang akan digunakan dalam memenangkan Pemilu merupakan salah satu yang perlu dipersiapkan dan tentunya harus dipersiapkan guna menunjang proses kampanye partai politik dalam memenangkan kader-kader partainya pada pertarungan politik di Pemilu 2024 nanti. Friedrich (1963), Neumann (1966), dan Soltau (1952), Surbakti (2010) bersepakat bahwa kekuasaan adalah tujuan sekaligus alat tukar dalam aktivitas partai politik mencapai tujuan-tujuannya, yang dalam koridor formal dilakukan dalam kegiatan pemilihan umum.

Partai Golkar sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang juga sebagai partai besar di mana kekuasaan partai Golkar mengalami puncaknya pada masa rezim orde baru selama tiga dekade selalu memegang pucuk pimpinan Presiden dan perolehan kursi di parlemen yang dominan. Pasca Pemilu, partai Golkar justru mengalami banyak perubahan yang telah bertransformasi menjadi partai politik modern, terbuka dan demokratis sesuai dengan cita-cita reformasi guna dapat tetap ada eksistensya Golkar sebagai partai politik besar pasca reformasi 1998 yang mendapatkan citra buruk dari publik. Walaupun pada Pemilu 2004 partai Golkar mampu menjadi partai pemenang Pemilu dengan perolehan kursi di DPR terbanyak, namun pada

Pemilu 2009, 2014 dan 2019 partai Golkar belum pernah menjadi partai pemenang Pemilu atau bahkan memenangkan kader Golkar menjadi Presiden.

Tujuan dan keinginan Golkar tentunya menginginkan kejayaan dan kebesaran Golkar dapat dirasakan lagi dimana kekuasaan baik eksekutif dan legislatif mampu dikuasai oleh Golkar agar program-program kekaryaan yang merupakan ideologi Golkar dapat diimplementasikan melalui kebijakan politik apabila Golkar hadir sebagai partai pemenang Pemilu.

Partai Golkar

Partai Golkar adalah salah satu partai politik yang ada di Indonesia, partai Golkar awal mulanya merupakan sebuah organisasi masyarakat yang secara politis menjelma menjadi sebuah partai politik. Partai Golkar merupakan partai yang berideologi pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 AD/ART partai Golkar yaitu "Partai Golkar Berdasarkan Pancasila". Dalam pandangan partai Golkar, bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi, falsafah dan dasar negara yang dimana ideologi Pancasila bukan sebagai ideologi yang dogmatik, tertutup dan statis melainkan ideologi yang dinamis dan terbuka yang keberadaannya mampu untuk merespon segala bentuk dinamika.

Partai Golkar merupakan partai yang berorientasi terhadap kekaryaan tidak ekstrim sehingga Golkar dalam perspektif ideologi merupakan partai poros tengah yang berdiri secara moderat tidak memihak terhadap ideologi manapun secara ideologis karena didasarkan pada program kekaryaan. Sehingga dalam kontestasi politik di Indonesia pasca reformasi setelah Golkar mengalami banyak perubahan dalam berbagai macam aspek, Golkar selalu menjadi partai poros tengah yang

secara ideologis jarang sekali Golkar menjadi partai oposisi karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasannya Golkar selalu berorientasi terhadap program kekaryaan bukan pada nilai-nilai ideologis tertentu.

Adapun visi partai Golkar adalah:

1. Pengertian visi adalah sebuah gambaran tujuan atau cita-cita masa depan yang harus dimiliki oleh setiap organisasi.
2. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar Nomor: VII/Munas-VIII/Golkar/2009, Visi partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam tata pergaulan dunia.

Adapun misi partai Golkar adalah:

1. Pengertian misi adalah rumusan-rumusan utama sebagai penjabaran dan implementasi visi organisasi.
2. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) VIII partai Golkar Nomor: II/Munas-VIII/Golkar/2009, misi partai Golkar adalah:
 - a. Menegakan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - b. Mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang

untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan makmur, menegakan supermasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

- c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Visi dan misi Partai Golkar sejalan dengan fungsi partai politik sebagai alat mobilisasi dan integrasi, sebagai sarana dalam membentuk perilaku memilih, sebagai sarana dalam proses rekrutment politik dan sebagai sarana elaborasi dalam proses pemilihan kebijakan (Asshiddiqie, 2006).

Strategi Politik Partai Golkar

Pada dasarnya strategi politik adalah sebuah bentuk analisa tentang bagaimana sebuah proses yang terjadi dalam proses pemenangan suatu pertarungan politik baik oleh partai politik atau secara langsung oleh seorang calon yang akan berkontestasi dalam sebuah Pemilu yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh yang sebesar-besarnya dari masyarakat sebagai legitimasi demokrasi. Tentunya terdapat beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi proses ini, baik pada kekuatan politik yang ada dalam sebuah lingkungan baik secara mikro atau makro, mesin politik yang tersedia, pembangunan citra politik, dan proses kampanye lainnya yang dilakukan yang tentunya hal demikian merupakan sebuah instrumen dari sebuah usaha dalam proses pemenangan dalam pelaksanaan Pemilu.

Menurut Horowitz sebagaimana dikutip oleh Ar & Hasanuddin (2021) bahwa terdapat enam prinsip dalam strategi politik, yaitu:

- a) Politik merupakan sebuah perang menggunakan peralatan lain.
- b) Politik merupakan sebuah perang dalam memperebutkan posisi.
- c) Dalam kompetisi politik pemenang biasanya adalah seorang *aggressor*.
- d) Sebuah posisi dapat didefinisikan sebagai sebuah harapan dan kekuatan.
- e) Senjata dalam politik adalah simbol ketakutan dan harapan.
- f) Kemenangan dalam politik akan ada pada pihak rakyat.

Menurut Schröder (2010) menjelaskan terdapat dua strategi politik yaitu strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif merupakan strategi politik yang digunakan guna memperluas jangkauan market politik dengan menembus market politik lawan. Sedangkan strategi defensif adalah strategi politik yang digunakan dalam mempertahankan market politik dengan menutup segala bentuk kemungkinan kompetitor politik masuk pada market politiknya. Strategi ofensif terkesan sebagai sebuah strategi menyerang dimana seorang politisi akan berusaha untuk mempengaruhi market politik lawannya, sedangkan strategi defensif adalah strategi mempertahankan market politik yang telah dibina dalam kurun waktu tertentu agar lawan politiknya tidak dapat mempengaruhi keputusan politik pada market politiknya.

1. Strategi Defensif

Adapun strategi yang digunakan oleh partai Golkar dalam pemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak terlepas dari menggerakkan mesin partai politik dengan mengerahkan masa yang

dilakukan oleh setiap kader struktural partai politik. Melakukan konsolidasi partai merupakan salah satu bentuk cara yang biasa dilakukan oleh setiap partai politik sebagai langkah pertama dalam memenangkan kontestasi Pemilu. Konsolidasi tentu akan sangat dibutuhkan karena dengan melakukan konsolidasi bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadinya miss komunikasi karena tentunya komunikasi harus berjalan linear dari atas kebawah dan bawah keatas, sehingga segala bentuk program dapat dijalankan dengan baik.

Adapun bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh partai Golkar adalah dengan mengumpulkan kepengurusan partai tingkat Provinsi untuk dilakukannya konsolidasi pemenangan Pemilu. Konsolidasi partai Golkar dilakukan dengan tujuan untuk mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden dari partai Golkar di Pemilu 2024 (Kompas.id, 2023). Konsolidasi dilakukan dengan memberikan tanggungjawab terhadap setiap pengurus partai Golkar tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)/Provinsi untuk dapat mengkomunikasikan terhadap kader-kader partai Golkar diwilayahnya masing-masing baik pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pimpinan Kecamatan dan Desa. Tujuannya adalah untuk dapat memperkuat akar rumput partai Golkar dan mensolidkan kader-kader partai dalam memenangkan Golkar di Pemilu 2024 baik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif.

Konsolidasi internal dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar dengan mengumpulkan pengurus DPW partai Golkar di setiap Provinsi seluruh Indonesia. Sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan dengan penguatan

soliditas kader-kader partai yang melibatkan pengurus sayap partai, pegiat desa, relawan dan simpatisan partai Golkar untuk dapat mengkomunikasikan program partai Golkar kepada masyarakat dengan baik dan konsisten sehingga keberadaan Golkar ditengah-tengah masyarakat dapat dirasakan dengan baik yang membuat masyarakat akan dapat memilih partai Golkar dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

Karena pada dasarnya strategi defensif merupakan strategi mempertahankan pasar politik, jadi dalam hal ini partai Golkar dalam mempertahankan pasar politiknya melakukan konsolidasi internal partai guna meningkatkan soliditas kader partai agar tidak berpaling terhadap partai lain. Selain itu juga, partai Golkar melakukan konsolidasi terhadap simpatisan partai dan konstituen dari anggota legislatif partai Golkar dalam mempertahankan dukungan terhadap partai agar ketika menghadapi pelaksanaan Pemilu siap untuk dimobilisasi dukungannya.

2. Strategi Ofensif

Selain itu, dalam pemenangan partai Golkar dengan strategi ofensif dilakukan dengan melakukan pemetaan basis massa yang dilakukan dengan melakukan survei kembali mengenai pemilih tetap yang didasarkan pada hasil Pemilu sebelumnya. Selain itu, bentuk pemenangan strategi ofensif juga dilakukan oleh partai Golkar dengan memerintahkan kader-kader kepengurusan partai Golkar hingga tingkat yang paling bawah untuk hadir ditengah-tengah masyarakat dalam menyerap segala bentuk aspirasi masyarakat dalam proses menciptakan program-program partai Golkar dalam implementasi politik. Hal demikian seperti halnya yang dilakukan oleh pengurus DPD Golkar Surabaya dengan melakukan konsolidasi partai dengan

menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasi program padat karya terhadap masyarakat.

Partai Golkar dalam konsolidasi politik internal partai berkomitmen mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden tahun 2024 mendatang. Airlangga Hartanto tentunya sebagai ketua umum partai Golkar memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai kader terbaik partai Golkar untuk menjadi calon Presiden Indonesia di Pemilu 2024. Airlangga Hartanto mampu menyelaraskan dirinya sebagai seorang teknokrat dan politisi, sehingga mampu membawa gerbong politik teknokrat dan ideologi politik, keahlian Golkar yang diperoleh oleh Airlangga Hartanto ini berdasarkan pengalaman pembangunan di masa orde baru kepeimpinan Presiden Soeharto.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya partai Golkar sejak era Akbar Tandjung mampu memoles kembali Golkar pasca reformasi sehingga partai Golkar mampu menjadi partai besar yang mendapatkan kepercayaan publik karena stigma buruk Golkar oleh publik pada masa reformasi karena kepemimpinan rezim otoriter dan ditaktor Soeharto. Golkar tentunya menjadi partai politik yang mampu melahirkan kader-kader politik terbaik seperti halnya Wiranto sebagai pendiri partai Hanura, Surya Paloh sebagai pendiri partai Nasdem dan Prabowo sebagai pendiri partai Gerindra merupakan kader-kader Golkar sebelumnya lalu mendirikan partai politik sendiri.

Selain Akbar Tandjung, Abu Rizal Bakrie dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai kader Golkar juga melakukan transformasi terhadap Golkar. Terdapat suatu hal yang menetap yang dimiliki oleh partai Golkar tentunya apabila dibandingkan dengan partai politik lainnya yaitu metodologi politik. Partai

Golkar sebagai partai politik yang lebih banyak dalam implementasinya terhadap metodologis ketimbang ideologis, sehingga walaupun Golkar dalam internal partainya kerap terjadi konflik kepentingan namun dalam setiap momen akan menghadapi kemenangan Pemilu mereka mampu merapatkan barisan kembali, karena Golkar memiliki sistem yang sudah matang didalamnya yang membuat dirinya besar. Sehingga dalam Pemilu 2024 mendatang Golkar yang berusia 60 tahun berkomitmen untuk memenangkan Pemilu dengan mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden.

Pencalonan Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden bukan semata karena kepentingan politik kekuasaan, lebih dari itu bahwa mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden di Pemilu 2024 adalah sebuah langkah strategi politik. Karena apabila Golkar mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden maka tentu akan memberikan pengaruh elektoral terhadap kemenangan Golkar di Pemilu 2024 mendatang. Bukan tidak lain, tentunya kader-kader partai yang diusung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan memberikan pengaruh elektoral tentunya terhadap kemenangan perolehan kursi di parlemen.

Dalam memenangkan Pemilu 2024, partai Golkar juga menggunakan strategi politik kampanye udara melalui media sosial agar segala bentuk program partai dapat masuk terhadap setiap elemen dan kalangan masyarakat dalam menambah dukungan suara. Hal demikian seperti yang dikemukakan oleh Lodewijk F Paulus Sekretaris Jenderal partai Golkar dalam memenangkan Pemilu 2024 partai Golkar akan menggunakan pasukan udara melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya karena diibaratkan bahwa Pemilu merupakan sebuah perang

yang harus dimenangkan melalui strategi politik yang baik (Kompas.com, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi politik yang digunakan adalah menggunakan strategi mempertahankan pasar (defensif) dan strategi memperluas pasar (ofensif). Strategi partai Golkar bertumpu pada penguatan internal partai melalui konsolidasi partai baik pada tingkat DPP, DPW, DPD dan PK. Dalam konsolidasi menekankan pada tanggungjawab setiap pengurus partai untuk dapat mengkomunikasikan program dan kepentingan partai terhadap pengurus partai hingga akar rumput atau lebih dikenkan terhadap penguatan mesin partai politik. Selain itu, untuk dapat memperluas pasar politik dukungan terhadap Golkar dilakukan konsolidasi terhadap simpatisan, pegiat desa dan kepengurusan sayap partai. Dalam mendukung strategi politik sebagai sebuah rangsangan pendukung menggunakan media elektronik, media sosial dan media lainnya dalam mengkomunikasikan segala bentuk program partai terhadap publik.

Saran

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis melihat strategi pemenangan partai Golkar memang cukup baik dengan tetap mengusung Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden. Namun, penulis melihat bahwa Airlangga Hartanto memang seorang politisi yang tidak terlalu banyak gimick dan pencitraan di media sosial serta lebih banyak mengedepankan hal-hal yang lebih fundamental sebagai seorang Menteri dan pengurus partai, sehingga tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Sehingga, rencana pencalonan Airlangga sebagai calon Presiden di Pemilu 2024 menurut penulis terlalu prematur karena

mengingat popularitas Airlangga Hartanto masih kurang dikenal di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, B. A., & Hasanuddin. (2021). Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Upaya Mendapatkan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 1–12.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/article/view/29973
- Asshiddiqie, J. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. McGraw-Hill.
- Kompas.id. (2023, June 4). *Golkar Percaya Diri Tetap Usung Airlangga sebagai Capres 2024 -*. Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/04/golkar-percaya-diri-tetap-usung-airlangga-sebagai-capres-2024>
- Neumann, S. (1966). *Modern Political Parties, Approaches to Comparative Politics*. The University of Chicago.
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik* (3rd ed.). Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia .
- Soltau, R. H. (1952). *An introduction to politics*. Longmans.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.